

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022

Waktu : 09.30-Selesai

Tempat : Lab. Departemen Ilmu Sejarah

**MASA PEMERINTAHAN ANDI MADE ALIE DI KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 1965-1979**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya**

**Universitas Hasanuddin**

**Disusun Oleh:**

**ANDI FITRAH**

**F81115502**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

MASA PEMERINTAHAN ANDI MADE ALIE DI KABUPATEN  
SOPPENG TAHUN 1965-1979

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI FITRAH**

**F81115502**

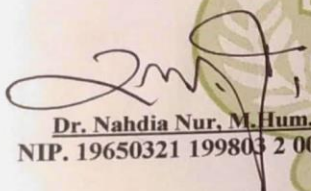
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 5 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.

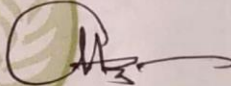


Menyetujui,  
Komisi Pembimbing

Konsultan I

Konsultan II

  
Dr. Nahdia Nur, M.Hum.  
NIP. 19650321 199803 2 001

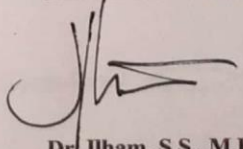
  
Drs. Abd. Rasvid Rahman, M.Ag.  
NIP. 19601231 199103 1 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin

  
  
Prof. Dr. Akin Duli, M.A.  
NIP. 19640716 199103 1 010

Ketua Departemen Ilmu Sejarah  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Ilham, S.S., M.Hum.  
NIP. 19760827 200801 1 001

## HALAMAN PENERIMAAN

**HALAMAN PENERIMAAN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Selasa, 5 Juli 2022, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**MASA PEMERINTAHAN ANDI MADE ALIE DI KABUPATEN  
SOPPENG TAHUN 1965-1979**

yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.



Makassar, 5 Juli 2022

1. Dr. Nahdia Nur, M.Hum.

Ketua

2. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag.

Sekretaris

3. Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum.

Penguji I

4. Nasihin, M.A.

Penguji II

5. Dr. Nahdia Nur, M.Hum.

Konsultan I

6. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag.

Konsultan I

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Andi Fitrah

NIM : F81115502

Departemen / Program Studi : Ilmu Sejarah/ Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“MASA PEMERINTAHAN ANDI MADE ALIE DI KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 1965-1979”**

Adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Kepenulisan ini sesuai dengan kaidah kepenulisan akademik, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya unsur-unsur plagiarisme dan tidak dibuktikan dengan metode historiografinya, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 5 Juli 2022

Saya membuat pernyataan,  
  
ANDI FITRAH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia serta rahmat-Nya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan dan halangan. Mulai dari pencarian literatur, pengumpulan data, sampai pengolahan data dan juga tahapan penulisan. Penulis menyadari dalam hasil penulisan ini masih banyak kekurangan karena tiada manusia yang luput dari kesalahan.

Penyelesaian penulisan skripsi ini adalah sebuah pekerjaan yang cukup berat sebab tidak hanya memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit, melainkan juga membutuhkan ketekunan, ketabahan dan tentunya kesabaran guna menyelesaikannya. Tulisan ini juga merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar "*Sarjana*" selama kurang lebih tujuh tahun berupaya mendapatkan ilmu dan pengetahuan dibangku perkuliahan Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Penulis pun dalam proses penulisan sangat dibantu oleh banyak pihak dalam menyelesaikan penulisan ini, terutama dari pembimbing dalam penulisan skripsi ini yaitu Ibu **Dr. Nahdiah Nur, M.Hum** selaku pembimbing satu dan Bapak **Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag** selaku pembimbing dua yang telah dengan sabar serta ikhlas membimbing dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Tidak lupa juga saya berterimakasih atas bantuan dan dukungan dari penguji saya yaitu Bapak Dr.

Suriadi Mappangara, M.Hum selaku penguji satu dan Bapak Nasihin, M.A selaku penguji dua.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati serta keikhlasan, penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil Rektor dan para jajarannya.
2. Bapak Prof. Akin Duli, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin beserta para wakil Dekan dan para jajarannya.
3. Bapak Dr. Ilham, S.S, M.Hum., selaku ketua departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Sekretaris Departemen Ibu A. Lili Evita, S.S., M.Hum., staf pengajar Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum., Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, Lc.P., M.Hum., Dr. Nahdia Nur, M.Hum., Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D., Dr. Ida Liana Tanjung, S.Pd., M.Hum., Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S., Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag., Nasihin, S.S., M.A., Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A., Dr. Bambang Sulistiyo Edy P, M.S., Alm. Prof. Rasyid Asba, M.A., dan Alm. Margriet Moka Lappia, S.S, M.S., yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan, serta ilmu yang telah diajarkan kepada penulis sejak pertama kali menyandang status mahasiswa sampai penyelesaian studi serta kepala kesekretariatan Udji Usman, S.Sos.

4. Ucapan terimakasih juga kepada kedua orang tua tercinta saya, Andi Ruse, S.pd, SD., dan Fatimah, S.pd, SD. atas segala dukungannya.
5. Terimakasih juga untuk istri saya terkasih Fitria Burhanuddin, S.E, serta saudara saya Andi Nilawati dan Andi Rasdiana, A,Md.Keb yang terus mendoakan.
6. **Teman-teman angkatan 2015** yang banyak memberikan dorongan untuk bisa menyelesaikan masa studi penulis dan menemani penulis semasa kuliah. Teman-teman seperjuangan Dharul, Arul, Putra, Yuli, Idhar, Ria, Suci, Suke, Ibe, Afif, Cici, Fitri, Mudrika, Isnaeni, Isna, Alip, Gama, Leha, Mila, Sahriana, Apriadi, dan Selvi.
7. **Keluarga Besar HUMANIS** yang selalu menjadi wadah, dan pembinaan berbagai Pengetahuan Sejarah, Pengalaman Organisasi, suka dan duka sebagai Mahasiswa, serta menumbuhkan karakter. Bantuan serta pengalaman yang sangat besar dari senior-senior serta junior tidak akan penulis lupakan.
8. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 99 Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Pajukukang, terutama Posko Desa Batu Karaeng yang telah memberi banyak kenangan selama KKN. Juga untuk Kepala Desa Batu Karaeng Bapak Gafrawi sekeluarga, Ibu dan Bapak Posko yang memperlakukan semua teman Posko seperti anak sendiri, Kak Ancha dan Kak Ola yang selalu hadir ditengah-tengah kami untuk memberikan saran, semangat, serta bantuan, semoga Tuhan memberikan kesempatan untuk bertemu kembali.

9. Pemilik Pondok Balqis yaitu sepupu saya sendiri Ahmad Amin Sulaeman yang telah memberikan tempat atau kamar gratis selama saya menjalani masa perkuliahan, menemani saya suka maupun duka. Juga teman-teman Pondok Balqis yaitu Herman Anwar Dkk yang selalu ada untuk menghibur.
10. Saudara saya Abdul Kadir (Kak Kadir) dan Nur Asia (Kak Ocha) yang selalu membantu dan memarahi demi kebaikan saya sendiri selama tinggal di Makassar.
11. Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan khazanah ilmu pengetahuan sosial-budaya kedepannya. Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Sehingga, berbagai kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi perbaikan penulisan sejarah di kemudian hari. Terimakasih.

Makassar, 5 Juli 2022

Andi Fitrah



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH	6
1.1.1 Batasan Masalah	6
1.1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 METODE PENELITIAN	8
1.5 TINJAUAN PUSTAKA	11
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN SOPPENG	16
2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Soppeng	16
2.1.1 Keadaan Geografis	16
2.1.2 Kondisi Sosial dan Kebudayaan: Pola Kepemimpinan dan Sistem Kemasyarakatan.	21

## 2.2 Kondisi Politik Kabupaten Soppeng Menjelang Pemerintahan Andi Made Alie

23

BAB III ANDI MADE ALIE SEBAGAI BUPATI KABUPATEN SOPPENG	31
3.1 Biografi Andi Made Alie	31
3.2 Latar Belakang Diangkatnya Andi Made Alie Sebagai Bupati Kabupaten Soppeng	36
BAB IV PEMERINTAHAN DAN PENCAPAIAN ANDI MADE ALIE DI KABUPATEN SOPPENG	48
4.1 Pemerintahan Andi Made Alie	48
4.1.1 Pemerintahan Andi Made Alie Pada Periode 1965-1970	48
4.1.2 Pemerintahan Andi Made Alie Pada Periode 1970-1975	54
4.1.3 Pemerintahan Andi Made Alie Pada Periode 1975-1979	58
4.2 PENCAPAIAN PEMERINTAHAN ANDI MADE ALIE	62
4.2.1 Di Bidang Kebudayaan	62
4.2.2 Di Bidang Ekonomi	64
4.2.3 Di Bidang Politik	65
4.2.4 Di Bidang Sosial	67
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77

## ABSTRAK

**Andi Fitrah (F81115502), dengan judul “Masa Pemerintahan Andi Made Alie di Kabupaten Soppeng Tahun 1965-1979” yang dibimbing oleh Dr. Nahdia Nur, M.Hum. dan Drs. Rasyid Rahman, M.Ag.**

Skripsi ini membahas mengenai sejarah pemerintahan Andi Made Alie di Kabupaten Soppeng pada 1965-1979. Membahas tentang pemerintahannya di Kabupaten Soppeng pada masa tersebut, maka hal itu dapat ditelusuri mulai dari latar belakang terpilihnya sampai dengan akhir masa jabatannya sebagai Kepala Daerah. Selama hampir tiga periode masa jabatannya, terdapat berbagai kebijakan dan program kerja yang dilakukan dan kemudian membawa perubahan di berbagai bidang, yaitu bidang kebudayaan, ekonomi, politik dan sosial. Salah satu program yang sukses dijalankan selama masa pemerintahannya yaitu melaksanakan program pemerintah pusat yang disebut dengan program REPELITA atau PELITA, yaitu PELITA I dan PELITA II.

Metode penelitian dalam skripsi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1) Pemilihan Topik, 2) Pengumpulan Sumber, 3) Kritik Sumber, 4) Interpretasi, dan 5) Historiografi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa sumber, maka dapat diketahui bahwa pemerintahan Andi Made Alie di Kabupaten Soppeng tidak dapat dipisahkan dari keberhasilannya dalam mengemban tugas sebagai Kepala Daerah.

**Kata Kunci:** *Kepala Daerah, Pemerintahan, Kebijakan, REPELITA, Pencapaian, Soppeng.*

## ABSTRACT

**Andi Fitrah (F81115502), with the title "The reign of Andi Made Alie in Soppeng Regency 1965-1979" who was supervised by Dr. Nahdia Nur, M. Hum. and Drs. Rashid Rahman, M.Ag.**

This thesis discusses the history of Andi Made Alie's government in Soppeng Regency in 1965-1979. Discussing his government in Soppeng Regency at that time, it can be traced from the background of his election to the end of his tenure as Regional Head. During almost three terms of his tenure, there were various policies and work programs that were carried out and subsequently brought changes in various fields, namely in the fields of culture, economy, politics and social. One of the programs that was successfully implemented during his reign was implementing a central government program called the REPELITA or PELITA program, namely PELITA I and PELITA II.

The research method in this thesis consists of several stages, namely 1) Topic Selection, 2) Source Collection, 3) Source Criticism, 4) Interpretation, and 5) Historiography. Based on the results of research on several sources, it can be seen that the government of Andi Made Alie in Soppeng Regency cannot be separated from his success in carrying out his duties as Regional Head.

**Keywords:** *Regional Head, Government, Policy, REPELITA, Achievement, Soppeng.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kepala daerah, kebijakan dan wilayah pemerintahan merupakan unsur yang menarik dalam kajian studi sejarah pemerintahan Kabupaten di Indonesia. Kepala Daerah atau yang sering disebut Bupati adalah perangkat yang menjalankan pemerintahan di tingkat regional yang sering disebut Bupati. Para Kepala Daerah ini menjalankan kebijakan pembangunan sesuai dengan kondisi politik sesuai zamannya. Suatu kepala Daerah, tidak akan dilepaskan dari suatu wilayah yang dipimpinnya.

Wilayah Sulawesi Selatan, dan khususnya Soppeng adalah salah satu wilayah yang ditata setelah kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mulai menata administratif pemerintahannya dengan membentuk struktur pejabat pemerintahan dari tingkat pusat ke daerah. Proses itu dimulai, setelah Kolonial Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara resmi sebagai Negara pada tanggal 27 Desember 1949.<sup>1</sup>

Pada tahun 1958 Soppeng dijadikan Daerah Otonomi Tingkat II Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1957.<sup>2</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri

---

<sup>1</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991). hlm. 294.

<sup>2</sup> Drs. H. Nonci, S.Pd. *Sejarah Soppeng Zaman Prasejarah sampai Kemerdekaan*. (Makassar: CV. Aksara, 2003). hlm. 330.

Dalam Negeri NOUP.7/2/24 tanggal 6 Februari 1957 tentang pengangkatan Andi Mappanyukki selaku Kepala Daerah Bone dan Andi Wana selaku Kepala Daerah Soppeng, maka berarti berakhirilah riwayat “Kerajaan Soppeng” dan melebur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari pelantikan ini, maka Andi Wana merupakan Datu Soppeng XXXVI (terakhir) dan dijadikan sebagai Kepala Daerah (Bupati) Soppeng I (pertama).<sup>3</sup> Pada masa ini, kepala daerah yang diangkat adalah kepala daerah pada masa sebelumnya. Dengan alasan karena situasi keamanan, politik, dan hukum ketatanegaraan kala itu sedang tidak stabil.

Posisi kepala daerah dalam sistem pemerintahan sangat strategis, sehingga seorang kepala daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamis, aktif, dan komunikatif, menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang individu masing-masing Kepala Daerah. Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Undang-Undang pertama yang diterbitkan pada masa kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945. Undang-Undang ini bermaksud mengubah sifat Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang

---

<sup>3</sup>M.Rafiuddin Nur, *Lontara-na Soppeng dari Kerajaan Kembar menuju Kabupaten*.

(Makassar: Rumah Ide,2007), hlm. 234.

diketahui Kepala Daerah yang bertugas mengatur rumah tangga daerahnya dengan syarat asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dan peraturan daerah yang lebih tinggi kedudukannya. Tujuan lain dari UU Nomor 1 Tahun 1945 ini adalah untuk mempersiapkan pemilihan umum. Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1957, Pemerintah Daerah kemudian terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD).<sup>4</sup>

Peran DPRD dan DPD dalam pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 1957, menunjuk Kepemimpinan Kepala Daerah baru di Kabupaten Soppeng, dari Kepala Daerah Andi Wana digantikan oleh kepala Daerah baru, yaitu Andi Mahmud (1960-1964). Pada masa perkembangannya, Andi Mahmud kemudian digantikan oleh A.M. Amin Daeng Situru, ia memerintah sebagai pelaksana tugas sementara dalam kurung waktu 1964-1965. Setelah polemik 1965, para kepala daerah kemudian dipilih kembali, maka ditunjuklah Andi Made Alie menjadi Kepala Daerah Soppeng, dimana ia menjabat selama hampir tiga periode (1965-1979).<sup>5</sup>

Proses terpilihnya Andi Made Alie tidak dilepaskan dari perkembangan politik dalam pergeseran Orde Lama ke Orde Baru, perkembangan tersebut telah membawa nuansa baru dalam kepemimpinan Kepala Daerah. Sebelum UU Nomor 5

---

<sup>4</sup> J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 30.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

tahun 1974<sup>6</sup> dikeluarkan, terlebih dahulu dikeluarkan UU Nomor 18 Tahun 1965 karena kuatnya pertimbangan politik, utamanya Partai Komunis Indonesia. UU Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah keluar setelah terjadinya Pemberontakan G-30-S/PKI dan adanya kehendak untuk melakukan pembangunan dalam segala bidang kehidupan.<sup>7</sup>

Di Kabupaten Soppeng setelah terjadi pengangkatan Kepala Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1974 tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah Bab II Pasal 2 bahwa:

“Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pimpinan Fraksi-fraksi bermufakat untuk menetapkan nama-nama sedikit-dikitnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon Kepala Daerah untuk dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974...”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Perlu dicatat, meskipun UU No.5 Thn 1974 ini lebih baik dari UU pemerintahan sebelumnya, sekarang sudah diganti dengan UU No.22/1999 yang kemudian diganti lagi dengan UU No.32/2004 dan diubah lagi pada tahun 2005 dengan Perpu No.3/2005, kemudian diubah lagi dengan UU No.12 Tahun 2008.

<sup>7</sup> Prof. Dr. HRT. Sri Soemantri M,SH, *Otonomi Daerah*. (Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya, 2014), hlm, 50.

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil, SH, *Peraturan Tata Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: pradnya Paramita, 1982), hlm. 276.



Setelah calon Kepala Daerah terpilih menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1974 tentang tata baca pencalonan, pemilihan dan pengangkatan kepala Daerah Bab IV Pasal 10 bahwa:

“segera setelah calon-calon terpilih Kepala Daerah ditetapkan, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengajukan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon-calon terpilih Kepala Daerah Tingkat I dan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah bagi calon-calon terpilih Kepala Daerah Tingkat II...”<sup>9</sup>

Berdasarkan berbagai peraturan tersebut di atas maka terpilihlah Andi Made Alie sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Soppeng yang kedua kalinya. Sebelumnya ia telah menjadi Kepala Daerah di Kabupaten Soppeng pada tahun 1965-1970 dan melanjutkan periode jabatannya hingga Tahun 1979. Andi Made Alie adalah seorang Letnan Kolonel AD sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat di Kabupaten Soppeng. Pada periode yang sama dengan Andi Made Alie di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan diangkat pula Kepala Daerah dengan profesi yang sama yakni Letkol AD.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dari itu penulis membahas lebih jauh tentang “Masa Pemerintahan Andi Made Alie di Kabupaten Soppeng Tahun 1965-1979”, dimana ia begitu banyak melakukan hal demi kemajuan Kabupaten Soppeng. Salah satunya adalah ketika beliau berhasil mengantarkan Kabupaten Daerah Tingkat

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 278.

II Soppeng meraih PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA<sup>10</sup> sebagai daerah yang dianggap paling maju dalam meningkatkan serta melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk suatu tahap PELITA. Alasan penulis untuk mengkaji pemerintahan Andi Made Alie karena adanya pengangkatan Kepala Daerah secara serentak dari kalangan ABRI pada tahun 1965 dan prestasi yang telah beliau raih selama memerintah di Daerah Tingkat II Soppeng.

## **1.2 BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH**

### **1.1.1 Batasan Masalah**

Penelitian ini bertujuan menghindari penyimpangan dalam penguraian jawaban dari masalah yang dikaji oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti memberikan batasan uraian yang akan disajikan oleh penulis yakni, batasan temporal dan spasial.

Lingkup batasan temporal dalam penelitian ini adalah, dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1979. Penulis memulai tahun 1965 karena penunjukkan langsung Andi Made Alie sebagai kepala daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 1965. Pada tahun 1979 adalah masa akhir jabatan Andi Made Alie sebagai Kepala Daerah Kabupaten Soppeng.

---

<sup>10</sup>PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA adalah suatu Tanda Kehormatan yang diadakan dengan tujuan untuk memberikan penghargaan kepada Propinsi/Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh Rakyat.

Ruang lingkup spasial atau tempat yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah wilayah Kabupaten Soppeng. penelitian merupakan kajian tentang Pemerintahan Andi Made Alie di Kabupaten Soppeng maka batasan spasialnya yaitu skala lokal.

### **1.1.2 Rumusan Masalah**

Berhubungan dengan hal ini, penulis merumuskan masalahnya. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terpilihnya Andi Made Alie sebagai Kepala Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 1965?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pencapaian dari pemerintahan Andi Made Alie sebagai Kepala Daerah dalam bidang kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik di Kabupaten Soppeng 1965-1979?

## **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang terpilihnya Andi Made Alie sebagai Kepala Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 1965.
2. Mengetahui pelaksanaan dan pencapaian dari pemerintahan Andi Made Alie dalam bidang kebudayaan, sosial, dan politik di Kabupaten Soppeng tahun 1965-1979.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa, khususnya mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah, penelitian ini dapat menjadi sumber literatur guna menambah wawasan kesejarahan khususnya di daerah Soppeng.
2. Bagi Universitas, penelitian ini bermanfaat untuk menambah koleksi penelitian mahasiswa di Perpustakaan Pusat maupun Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.
3. Bagi penulis, ini menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar S1 pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

### **1.4 METODE PENELITIAN**

Metode diartikan sebagai cara atau prosedur yang sistematis dalam merekonstruksi masa lampau. Istilah metode hendaknya diartikan yang lebih luas, tidak hanya pelajaran mengenai analisis kritik saja, melainkan juga meliputi usaha sintesa dari pada data yang ada sehingga menjadi penyajian dan kajian sejarah yang dapat dipercaya. Metode sejarah bertujuan memastikan dan mengatakan kembali fakta masa lampau. Gejala-gejala sosial dan kebudayaan merupakan lapangan kerja dari metode itu.

Penelitian ini merupakan penelitian bersikap deskriptif analisis dengan tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pemerintahan suatu daerah. Penelitian ini

diarahkan untuk meneliti, mengungkapkan serta menjelaskan peristiwa yang telah lampau sehingga jelaskan diarahkan kepada metode penelitian sejarah yang bersifat kualitatif. Penelitian ini termasuk kajian sejarah daerah yang bersifat lokal karena dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana kepemimpinan seorang sosok pemimpin daerah yakni Andi Made Alie selaku Bupati Soppeng.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau, melalui lima tahapan kerja yaitu Pemilihan Topik, Heuristik (pengumpulan sumber), Kritik Sumber (eksternal dan internal), Interpretasi (penafsiran), dan Historiografi (penulisan sejarah).

Pemilihan Topik,<sup>11</sup> adalah suatu tahapan kerja awal dalam penelitian sejarah. Dalam hal ini, penulis tertarik pada topik sejarah pemerintahan daerah, khususnya pada masa Pemerintahan Andi Made Alie di Kabupaten Soppeng.

Pengumpulan sumber merupakan proses pencarian atau pengumpulan sumber-sumber yang akan digunakan untuk merekonstruksi sejarah. Sebelum menentukan teknik pengumpulan sumber sejarah yang akan dikumpulkan, penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat (dimana) atau siapa (sumber informasi lisan) dan cara memperolehnya. Sumber sejarah primer yang tertulis dalam sejarah umumnya berupa dokumen (arsip). Pengumpulan sumber yang terkait dengan penelitian ini dikhususkan pada periode atau masa pada saat terpilihnya Andi Made

---

<sup>11</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu sejarah*, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 2013), hlm. 67.

Alie pada tahun 1965 hingga akhir masa jabatannya di tahun 1979, dengan ini penulis menggunakan arsip-arsip yang sezaman dengan periode tersebut, beberapa narasumber, serta buku-buku dan literatur penunjang. Proses pengumpulan sumber diawali dengan berkunjung ke Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dan mendatangi langsung rumah atau kediaman para narasumber.

Kritik Sumber. Bagian dari penafsiran dan pengkajian sumber, dimana penulis melakukan verifikasi kembali terhadap sumber yang telah diperoleh untuk mengetahui keabsahannya.<sup>12</sup> Sebagai seorang peneliti, seorang sejarawan haruslah bersikap curiga, sangsi dan berhati-hati tentang cerita atau keterangan sumber sebelum menerima dan mempercayai kebenaran. Dalam melakukan kritik sumber sejarah terdapat dua hal penting yang harus dilakukan, yakni kritik otentisitas (kritik eksternal) dan kritik kredibilitas (kritik internal) yang berupa pengolahan arsip.

Interpretasi, tahap ini merupakan tahap setelah kritik sumber, sumber-sumber sejarah yang telah didapatkan akan diseleksi atau dipilih agar penulis mengetahui sumber-sumber yang betul berkaitan dengan judul yang akan ditulis. Oleh karena itu, perlu ditafsirkan oleh sejarawan atau peneliti. Berdasarkan hal itu, maka seorang peneliti akan menyusun fakta-fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat mengambil sebuah kesimpulan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

Historiografi atau penulisan yakni proses penulisan sejarah dan banyak aspek yang terkait didalamnya. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi adalah hal yang sangat penting. Dengan demikian urutan kejadian merupakan kunci pokok dalam penulisan sejarah. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penulisan sejarah. Pada tahap ini penulis akan menulis peristiwa sejarah tersebut dalam sebuah tulisan yang dalam penulisan, pemaparan dan pelaporan menggunakan tata cara tertentu. Dengan analisis ini akan diperoleh pengetahuan tentang Masa Pemerintahan A. Made Alie di Kabupaten Soppeng Tahun 1965-1979 yang akan menambang kajian historiografi lokal di Indonesia dan terkhusus di Sulawesi Selatan

## **1.5 TINJAUAN PUSTAKA**

Supaya penelitian ini dapat memberikan informasi konkrit mengenai masalah yang diangkat, maka tinjauan pustaka sangat diperlukan. Pada penelitian ini penulis menggunakan literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

Sumber yang dipakai dalam penulisan ini adalah beberapa arsip dari Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng Volume I Tahun 1908-1976.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, digunakan sebagai acuan dalam metode penelitian dan membahas tentang pembelajaran metode penelitian sejarah.

Buku yang berjudul “*Sejarah Sulawesi Selatan jilid I, oleh Edward L. Poelinggomang, Suriadi Mappangara*”<sup>13</sup> dalam buku ini menjelaskan tentang pemerintahan di Kerajaan Soppeng awal dari sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh Datu Soppeng, dimana pemerintahan yang dimaksud adalah sebelum masuknya bangsa asing ke Nusantara.

Dalam buku yang sama “*Sejarah Sulawesi Selatan jilid II, oleh Edward L. Poelinggomang, Suriadi Mappangara*”<sup>14</sup> dalam jilid dua menjelaskan kedatangan bangsa Belanda yang menjajah Nusantara dan menerapkan sistem pemerintahannya.

Buku yang lain dengan judul “*Lontara-na Soppeng dari Kerajaan Kembar Menuju Kabupaten oleh M. Rafiuddin Nur*”<sup>15</sup> yang menjelaskan tentang pemerintahan yang terjadi di Kerajaan Soppeng sebelum menjadi kabupaten hingga setelah terbentuknya kabupaten. Dalam buku “*Sejarah Arajangna Soppeng jilid 2*

---

<sup>13</sup> Edward L. Poelinggomang, Suriadi Mappangara, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I*. (Sulawesi Selatan: Balitbanda, 2005). hlm. 40.

<sup>14</sup> Edward L. Poelinggomang, Suriadi Mappangara, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid II*. (Sulawesi Selatan: Balitbanda, 2005), hlm. 38.

<sup>15</sup> M.Rafiuddin Nur, *Lontara-na Soppeng dari Kerajaan Kembar menuju Kabupaten*. (Makassar: Rumah Ide,2007), hlm. 191.



oleh Hary Sumange”<sup>16</sup> dalam buku ini menjelaskan posisi atau struktur pemerintahan Kerajaan Soppeng.

Drs. Salam Baco, *Soppeng Dalam Tiga Dimensi Sejarah*. Buku ini menjelaskan tentang pertama kali berdirinya Kerajaan Soppeng hingga Berubah menjadi Kabupaten, serta menjelaskan pencapaian dari masing-masing bupati yang pernah memerintah di Kabupaten Soppeng.

Tulisan Jurnal PATTINGALLOANG: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, Jurnal Patingalloang, Vol. 7, No.1, Agustus 2020 yang ditulis Dodi Doigo Rahmada, Patahuddin yang berjudul *Dinamika Pemerintahan Soppeng Pada Masa Afdeling Bone Hingga Masa Pemerintahan Andi Wana 1905-1960*. Peranan Andi Wana dalam menjalankan pemerintahan di Soppeng sangat beragam dan menyentuh banyak aspek di Soppeng, pembentukan DPRD Soppeng dan terbentuknya Daerah Tingkat II Soppeng terjadi pada masa pemerintahan Andi Wana tahun 1957. Andi Wana menjadikan Soppeng sebagai salah satu daerah yang bukan hanya daerah yang subur dan maju dalam hal ketersediaan pangan dan perkembangan daerahnya, juga sebagai salah satu daerah yang memiliki basis pejuang yang cukup diperhitungkan. Selain memajukan perekonomian Soppeng, beliau juga turut memperhatikan dan mengembangkan berbagai bidang, seperti Bidang Pendidikan, Pertanian, Agama, Kebudayaan dan lain-lain. Hal inilah yang

---

<sup>16</sup> Hary Sumange, *Sejarah Arajangna Soppeng Jilid 2*, (Watansoppeng: Yayasan Bina Budaya Soppeng, 2003), hlm. 137.

membuat Andi Wana menjadi salah satu pemimpin yang dikenang dalam sejarah Soppeng.<sup>17</sup>

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Setelah melakukan penelitian, penulis kemudian melakukan penulisan karya ilmiah seutuhnya berjudul “Masa Pemerintahan Andi Made Alie di Kabupaten Soppeng Tahun 1965-1979”. Penjabaran penulisan disesuaikan dengan kronologi dan alur perjalanannya. Pada bagian ini terdapat ringkasan garis besar dari lima bab yang terdapat di dalam Skripsi. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

### 1. Bab I: Pendahuluan

Bab pertama menjelaskan tentang hal-hal yang mendasari penelitian ini. Pada bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau kajian historiografi yang relevan, dan sistematika pembahasan. Adapun sistematika dalam bab I ini dibuat menyesuaikan dengan pedoman penulisan dan pelaksanaan tugas akhir skripsi yang dibuat oleh Tim Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

### 2. Bab II: Gambaran Umum Kabupaten Soppeng

---

<sup>17</sup> Dodi Doigo Rahmada, Patahuddin, *Dinamika Pemerintahan Soppeng Pada Masa Afdeling Bone Hingga Masa Pemerintahan Andi Wana 1905-1960*, (Jurnal PATTINGALLOANG: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, Jurnal Pattingalloang, Vol. 7, No.1, Agustus 2020), hlm. 172-187.

Bab kedua berisi gambaran umum Daerah Tingkat II Kabupaten Soppeng, yang berisi letak dan kondisi lingkungan alam dan iklim, keadaan penduduk dan latar belakang kehidupan sosial budaya masyarakatnya.

### 3. Bab III: Andi Made Alie Sebagai Kepala Daerah Kabupaten Soppeng

Bab ketiga mengurai biografi serta latar belakang terpilihnya Andi Made Alie sebagai kepala daerah Kabupaten Soppeng.

### 4. Bab IV: Pemerintahan dan Pencapaian Andi Made Alie di Kabupaten Soppeng

Bab keempat mengurai tentang pelaksanaan serta pencapaian pemerintahan di bidang kebudayaan, politik, sosial Andi Made Alie di Kabupaten Soppeng selama masa jabatannya.

### 5. Bab V: Kesimpulan

Bab kelima memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta merupakan penutup dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**

Gambaran umum menjelaskan beberapa gambaran umum di Kabupaten Soppeng yaitu dari segi keadaan geografis, kondisi sosial dan kebudayaan, serta kondisi politik Kabupaten Soppeng. Dalam keadaan geografis dijelaskan tentang letak daerah, luas wilayah, batas-batas wilayah dan pertumbuhan penduduk serta sarana rekreasi di wilayah tersebut.

Kondisi sosial menjelaskan tentang pola kepemimpinan dan sistem kemasyarakatan yang berlaku di Kabupaten Soppeng yang banyak dipengaruhi oleh sistem kepemimpinan kolonial. Perkembangan politik dan konstitusional juga tak luput dibahas untuk lebih memberikan gambaran mengenai kondisi politik pada saat itu.

#### **2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Soppeng**

##### **2.1.1 Keadaan Geografis**

Aspek geografis dalam kajian ilmu sejarah adalah bagian yang tak dapat dipisahkan, karena suatu tempat terjadi peristiwa sejarah. Selain itu kondisi dan potensi geografis suatu daerah mempunyai pengaruh terhadap mata pencaharian, keadaan penduduk, watak dan kepribadian masyarakat. Dengan ini perlu dibahas secara umum kondisi Kabupaten Soppeng terutama keadaan alam.

Mengenai kondisi geografis, Polak berpendapat bahwa:

“...., Keadaan geografis adalah segala kondisi yang tersedia oleh alam bagi manusia, khususnya kombinasi-kombinasi lain. Demikian keadaan geografis

meliputi tanah dengan seluruh kekayaannya, darat, laut, gunung, tumbuh-tumbuhan dan binatang, segala gaya harmonis seperti gaya berat listrik, sinar dan sebagainya termasuk iklim, musim, banjir, angin topan, dan gempa bumi, pendek kata pengaruh manusia”<sup>18</sup>

Jadi, jika merujuk dari apa yang telah dikemukakan oleh Polak di atas maka pembahasan mengenai aspek geografis adalah segala hal yang tersedia bagi manusia oleh alam yang mempunyai pengaruh bagi manusia dan kehidupannya.

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Kabupaten Soppeng terletak pada 4006° lintang selatan dan 4032° lintang utara, 119042’80° bujur timur dan 120006’13° bujur barat<sup>19</sup>. Luas wilayah Kabupaten Soppeng 1.500 Km<sup>2</sup> yang meliputi tanah yang bergunung-gunung, dataran rendah, sungai, rawa-rawa, dan danau yang menjadi beberapa wilayah pada umumnya mengalami kerusakan, tidak terpelihara karena gangguan keamanan masyarakat terhadap DI/TII pada saat itu<sup>20</sup>. Kabupaten Soppeng memiliki delapan wilayah kecamatan antara lain:

1. Kecamatan Lalabata dengan ibu kota Watansoppeng
2. Kecamatan Lirililau dengan ibu kota Cabenge

---

<sup>18</sup> Gusniawati, *Orang Madura di Makassar (1951-2011)*, Skripsi tidak diterbitkan (Makassar:FIS UNM,2014), hlm. 15.

<sup>19</sup> Shaff Muhtamar, *Buku Cerdas Sulawesi Selatan*, (Gowa Sulawesi Selatan: Yayasan Karaeng Pattingalloang, 2005), hlm. 32.

<sup>20</sup> Andi Ahmad Saransi, *Memori Let. Kol. Andi Made Alie Bupati Tingkat II Soppeng thn 1965-1979*, hlm. 257.

3. Kecamatan Liriaja dengan ibu kota Cangadi
4. Kecamatan Marioriwawo dengan ibu kota Takalala
5. Kecamatan Marioriawa dengan ibu kota Batu-batu
6. Kecamatan Donri-donri dengan ibu kota Tajuncu
7. Kecamatan Ganra dengan ibu kota Ganra
8. Kecamatan Citta dengan ibu kota Citta

Batas-batas administrasi Kabupaten Soppeng adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru

Sedangkan pada tahun 1965 di awal pemerintahan Andi Made Alie jumlah kecamatan di Kabupaten Soppeng sebanyak lima kecamatan yaitu, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lirilau, Kecamatan Liriaja, Kecamatan Marioriwawo dan Kecamatan Marioriawa.

Di tahun 1978 jumlah desa di Kabupaten Soppeng sebanyak 34 desa dan 90 kampung. Dapat dilihat dari keterangan wilayah dibawah bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Soppeng tahun 1969-1978 <sup>21</sup>sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Andi Ahmad Saransi, *Memori Let. Kol. Andi Made Alie Bupati Tingkat II Kabupaten Soppeng thn 1965-1979*, hlm. 61.

Daerah	1969	%	1979	%	Pertumbuhan penduduk tahun 1969-1978
Kota	15.639	6,96	16.410	6,80	4,69%
Desa	208.989	93,04	224.600	93,20	6,95%
Jumlah	224.628	100	241.010	100	

**Tabel 1: Pertumbuhan Penduduk Daerah Desa dan Kota**

**Sumber: Arsip Nasional**

Dari data diatas bisa dilihat bahwa pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Soppeng di daerah kota dari tahun 1969-1978 sebanyak 4,69% dan daerah desa sebanyak 6,95% dan persebaran penduduk daerah kota mengalami peningkatan dari tahun 1969 hanya 15.639 jiwa meningkat di tahun 1978 sebanyak 16.410 jiwa. Di daerah desa pun peningkatan persebaran penduduk mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan di tahun 1969 sebanyak 208.989 dan di tahun 1978 sebanyak 224.600.

Dari pertumbuhan penduduk ini pekerjaan yang sangat menonjol di Kabupaten Soppeng adalah pegawai. Berikut perkembangan jumlah pegawai dari tahun 1969- November 1979 <sup>22</sup>dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

Tahun	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
1969	281	562	9	-	1.052
1970	282	763	9	-	1.054
1971	272	765	9	-	1.046
1972	240	799	12	-	1.051
1973	226	829	12	-	1.067
1974	238	992	12	-	1.245
1975	316	1.167	25	-	1.245
1976	307	1.232	49	-	1.588
1977	278	1.327	68	-	1.673
1978	278	1.410	95	-	1.783

**Tabel 2: Perkembangan Jumlah Pegawai di Kabupaten Soppeng**

**Sumber : Arsip Nasional**

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun peningkatan jumlah pegawai baik dari golongan I, II dan III mengalami peningkatan namun pada tahun 1969-November 1979 penduduk yang berprofesi sebagai pegawai tidak ada yang berada di golongan IV.

Di sektor pembangunan pada awal PELITA I sampai PELITA II telah dibangun Masjid Raya Soppeng dengan biaya Rp. 135.000.000,-. Masjid ini telah mendapat bantuan dari bapak Presiden sebanyak Rp. 20.000.000,- masing-masing tahap pertama sebesar Rp. 12.000.000,- dan selanjutnya tahap kedua sebesar Rp. 8.000.000,-.

Sarana Rekreasi pun tak luput dalam pembangunan di Kabupaten Soppeng yaitu Permandian Alam Ompo sebagai pusat rekreasi di Kabupaten Soppeng dengan



biaya APBN Rp. 15.700.000,-. Sarana Olah Raga juga mendapat perhatian selama masa jabatan Andi Made Alie dan pada masa pemerintahannya, seluruh Daerah Tingkat II/Kotamadya di Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng menempati urutan kedua sesudah Kotamadya Ujung Pandang untuk kelengkapan sarana Olahraganya seperti tersedianya Stadion Olahraga yang cukup Representatif, kolam renang dan lain-lain.

### **2.1.2 Kondisi Sosial dan Kebudayaan: Pola Kepemimpinan dan Sistem**

#### **Kemasyarakatan.**

Dalam pokok bahasan ini, menguraikan pembahasan mengenai pola kepemimpinan dan sistem stratifikasi pada masyarakat soppeng dari sistem kerajaan (feodal), sistem kepemimpinan yang dipengaruhi struktur kolonial, dan kenegaraan Indonesia. Sistem yang terbangun tersebut menjadi pola periodisasi dalam penulisan ini kedepannya.

Pola kepemimpinan pada masa kerajaan (feodal) tidak dilepaskan dari sejarah terbentuknya Kerajaan Soppeng. Terbentuknya kerajaan Soppeng tidak dilepaskan dari kisah To manurung. Kepemimpinan awal To Manurung inilah yang memulai membentuk stratifikasi sosial atau pelapisan sosial.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> stratifikasi adalah pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat ada yang bersifat terbuka dan ada yang bersifat tertutup. Stratifikasi sosial yang terbuka ada kemungkinan anggota masyarakat dapat berpindah dari status yang satu ke status yang lain berdasarkan usaha-usaha tertentu. Namun stratifikasi sosial tertutup

Di Sulawesi Selatan khususnya orang Bugis-Makassar ada tiga lapisan pokok pada pelapisan sosial yakni: *Anakarung* adalah lapisan kaum kerabat raja-raja, yang kedua *To-maradeka* adalah lapisan sosial orang merdeka yang merupakan sebagian besar dari rakyat Sulawesi Selatan dan yang ketiga yaitu *Ata* adalah pelapisan sosial orang budak, orang yang ditangkap dalam peperangan, orang yang tidak dapat membayar hutang atau orang yang melanggar pantangan adat. Masyarakat Bugis-Makassar pada mulanya hanya terdiri dua lapisan sosial dan lapisan *Ata* merupakan perkembangan yang terjadi dalam zaman perkembangan organisasi-organisasi pribumi di Sulawesi Selatan. Pada permulaan abad ke-20 lapisan *Ata* mulai hilang karena larangan dari pemerintah kolonial dan desakan dari agama.<sup>24</sup>

Di Kabupaten Soppeng masih sangat kental dengan strata sosial dimana sistem kasta masih sangat dipegang teguh oleh masyarakat, dengan keanggotaan berdasarkan keturunan, keunggulan yang diwariskan berlaku seumur hidup, perkawinan endogami, hubungan dengan kelompok sosial lain terbatas, penyesuaian diri ketat pada norma-norma kasta, diikat oleh kedudukan yang sudah ditetapkan secara tradisional.

Budaya tersebut terus terbangun dalam berjalannya peradaban di tanah Soppeng. Hingga di periode 1965 budaya strata tersebut masih berlangsung dan akan

---

membatasi atau tidak memberikan kemungkinan seseorang untuk berpindah dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik keatas maupun kebawah.

<sup>24</sup> Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan. 1998), hlm. 276.

tergambarkan lebih jelas dalam penulisan skripsi ini tentang bagaimana peran dan fungsi dari strata sosial yang terbangun selama masa periode pemerintahan bupati Andi Made Alie.

## **2.2 Kondisi Politik Kabupaten Soppeng Menjelang Pemerintahan Andi**

### **Made Alie**

Indonesia, yang dikenal sebagai Hindia Belanda sebelum 1945, adalah sebuah negara multi-etnis dan multi-agama yang memiliki penduduk sekitar 179 juta orang. Kelompok etnis terbesar adalah suku Jawa yang jumlahnya hampir mencapai lima puluh persen jumlah penduduk keseluruhan. Mereka merupakan kekuatan yang berpengaruh di dalam birokrasi, militer, dan politik Indonesia.

Sifat multi-etnis dan multi-agama tercermin dalam politik Indonesia maupun dalam partai-partai politiknya. Munculnya partai-partai politik di Indonesia merupakan suatu fenomena yang agak baru. Ini berkaitan dengan timbulnya gerakan kemerdekaan yang dimulai pada awal abad ke-20.

Peran-peran dari tokoh kemerdekaan Indonesia membawa pengaruh yang besar dari lapisan sentral Indonesia hingga ke pelosok daerah. Tercapainya kemerdekaan tersebut kemudian mengikat daerah-daerah kecil di Indonesia dalam satu sistem yang kemudian terbangun dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Di awal kemerdekaan Indonesia itu sendiri terjadi banyak polemik hingga pada masa tersebut kondisi Indonesia masih sangat rentan untuk terpecah. Mulai dari kembalinya agresi militer Belanda 1947, berlakunya sistem negara federasi dari tahun

1949 membawa pengaruh dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pergolakan tersebut dapat terselesaikan satu persatu hingga pada 17 Agustus 1950 sistem federasi di Indonesia dihapuskan menjadi puncak penyelesaian masalah Indonesia di awal kemerdekaan.

Perkembangan politik dan konstitusional-institusional di Indonesia dari 1957 sampai awal 1960-an didasarkan atas kesesuaian parsial kepentingan-kepentingan politik, ideologis, pribadi, dan materil di antara kedua pusat kekuasaan yang paling kuat, yakni Presiden Soekarno dan pimpinan Angkatan Darat. Pada tahun 1950-an tidak ada satupun partai politik yang mewakili “tradisi” militer Indonesia. Di tahun 1962 Presiden dan Angkatan Darat melakukan koalisi, secara teoritis, koalisi melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang terpisah dan yang secara potensial antagonistik menuju suatu tujuan bersama. Begitu tujuan yang mempertemukan pihak-pihak itu dalam suatu persekutuan telah tercapai, maka kepentingan yang terpisah dari pihak-pihak yang berkoalisi itu cenderung untuk berbenturan yang mengakibatkan pecahnya koalisi tersebut.<sup>25</sup>

Pada dasarnya periode Demokrasi Parleментар dikarakterisasikan oleh persaingan berbagai partai politik untuk memperoleh kekuasaan, dan kepentingan mereka yang sangat beragam menjadikan koalisi mereka selalu berumur pendek. Tentara berada di luar parlemen dan kepentingan-kepentingannya tidak bisa

---

<sup>25</sup> Sundhaussen, Ulf, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 279.

dilindungi di bawah sistem Demokrasi Konstitusional. Pengakuan resmi mengenai keterlibatan militer dalam politik terjadi ketika Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional pada 6 Mei 1957, setelah peranan partai politik dilumpuhkan dan Undang-Undang Darurat diberlakukan. Tujuan dari dibentuknya Dewan Nasional adalah purapura membentuk kabinet dalam menjalankan program-programnya, tetapi pada kenyataannya dimaksudkan untuk mengambil alih peranan partai-partai politik. Keanggotaan Dewan Nasional mencakup apa yang disebut golongan-golongan fungsional dalam masyarakat maupun pejabat-pejabat militer yang dipandang perlu.<sup>26</sup>

Peranan Militer Indonesia, terutama tentara (Angkatan Darat) dalam bidang militer dan non militer meningkat secara pesat selama dan sesudah 1957. Namun dalam tahun 1962 Presiden Soekarno memutuskan untuk tidak berkoalisi dengan Angkatan Darat, ia memutuskan untuk berjalan sendiri. Tetapi kekuatan Angkatan Darat yang sangat mantap di daerah-daerah mengharuskan Soekarno menggunakan siasat yang halus, terutama karena para pemimpin tentara berniat untuk tetap berkoalisi dengan dia. Bagi Soekarno, upayah untuk melepaskan diri dari koalisi dengan Angkatan Darat itu merupakan suatu proses yang berlarut-larut, dimana dia pada akhirnya merupakan pihak yang kalah.

Sikap negatif terhadap kegiatan politik mempunyai dasar yang kokoh dan berkaitan erat satu sama lain dalam kedua ciri organisasi militer yakni hierarki dan

---

<sup>26</sup> Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta:LP3ES, 1992), hlm. 10.

keterpaduan. Perwira militer cenderung untuk menggeneralisasikan apa yang telah dipelajari sesuai dengan bidang kegiatan utama mereka kepada bidang-bidang lain, karena hierarki dan keterpaduan menjadi ciri-ciri atau perlu menjadi ciri-ciri militer. Dalam sebagian angkatan bersenjata, Penilaian kepada aktivitas politik selalu membutuhkan penghormatan para perwira yang berkeinginan memperoleh atau mempertahankan status sosial yang tinggi dalam masyarakat, serta yang ingin mempertahankan citra profesi mereka. Perwira militer mempunyai pandangan yang mengabaikan politik tentang proses pemerintahan, suatu konsepsi yang tidak bercorak politik mengenai bagaimana masyarakat dapat dan patut diperintah.<sup>27</sup>

Perselisihan antara pihak militer dengan presiden menyangkut ketatanegaraan berdampak pada daerah-daerah diluar Pulau Jawa, misalnya di Sulawesi Selatan terkhusus di Kabupaten Soppeng di bidang keamanan. Adanya gangguan keamanan yang dilakukan oleh tiga gerombolan bersenjata yang dikenal dengan DI/TII, pasukan Permesta atau lazim disebut pasukan *LambaE* dan pasukan Perampok/*Pabangkung*. Ketiga bentuk organisasi ini masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda, cara kegiatannya dan saling bermusuhan yang dibuktikan dengan saling serang-menyerang.

Gerombolan yang dikenal dengan pimpinan Abd. Kahar Muzakkar yang bertujuan membentuk Negara Republik Islam adalah bentuk dari DI/TII di Sulawesi Selatan yang memiliki cabang di Kabupaten Soppeng yang menempati dataran tinggi

---

<sup>27</sup> Eric A. Nordlinger, *Militer Dalam Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 85.

dari Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Lalabata di sebelah Selatan menyusuri perbatasan Pare-pare, Barru ke Utara Dati II Bone dan Pangkep. Kekuatan anggota pasukannya di daerah ini terdapat 2 *Jon* dengan persenjataan 350 senjata campuran ditambah 14 *Bren* diantaranya 1 Bar *Bren* dibawah Komando Mayor D.I Mappe dengan jabatan Wakil Panglima Kombak I Lompo Battang.<sup>28</sup>

Kerugian atas pasukan perompak DI/TII, Permesta Muda di berbagai kecamatan di Kabupaten Soppeng mencapai Rp. 3.764.000 diantaranya Kecamatan Marioriwawo, Liliriaja, Lilirilau, dan Marioriawa pernah menjadi sasaran perompak dari pihak DI/TII dan Permesta Muda. Januari sampai Maret 1965 masih terasa adanya gangguan gerombolan pengacau liar di bagian Timur/Selatan dibawah pimpinan Andi Azis yang beranggotakan sekitar 150 orang dengan bersenjata 40 *Putjuk* tetapi dengan kerjasama antara pemerintah setempat, angkatan bersenjata, rakyat dan pemuda maka segala gangguan keamanan dapat diatasi. Setelah para perompak menyerah pada pertengahan April 1965 maka seluruh daerah Soppeng sudah aman dari gangguan perompak liar.

Beberapa kejadian di daerah Soppeng yang dapat diatasi oleh pemerintah setempat dan angkatan bersenjata maupun para rakyat dan pemuda antara lain gerombolan bersenjata sebanyak 13 kali, pembunuhan sebanyak 6 kali, kebakaran sebanyak 4 kali, penculikan sebanyak 2 kali, perampokan sebanyak 5 kali,

---

<sup>28</sup> Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng Volume I Jilid II 1960-1976.

penanaman ranjau oleh perompak sebanyak 1 kali, perkelahian sebanyak 1 kali, penyerangan perompak sebanyak 5 kali, membayar pajak panen untuk para perompak sebanyak 3 kali, penangkapan anggota PKI sebanyak 3 kali, anggota PKI melaporkan diri sebanyak 2 kali, dan penemuan senjata perompak sebanyak 1 kali.<sup>29</sup>

Untuk meningkatkan stabilitas keamanan pemerintah juga bekerja sama dengan kepolisian untuk mengamankan hutan yang dimana hutan sangat penting bagi kelangsungan hidup di suatu daerah dan sebagai sumber perekonomian daerah maka dari itu kepolisian meminta kepada Kehutanan Daerah Tingkat II Soppeng untuk memberikan nama-nama petugas kepolisian kehutanan serta sektor hutan yang diawasinya serta senjata api yang dipergunakannya, luas areal hutan dalam Kecamatan Lalabata dan izin-izin yang berkaitan dengan proses pengamanan kehutanan dalam Kecamatan Lalabata (cagar alam).<sup>30</sup>

Selain kondisi keamanan dan beberapa kondisi sosial yang patut diperhatikan sebelum masa jabatan Andi Made Alie sebagai Kepala Daerah atau Bupati di Kabupaten Soppeng yaitu gerakan-gerakan sosial seperti halnya gerakan buruh tani. Setelah Andi Made Alie menjabat, perluasan Sekolah Dasar terus menjadi sorotan di bidang pendidikan yang mengalami kemajuan pesat. Dari 130 buah gedung SD tahun ajaran 1964/1965 dan 191 buah SDN dengan murid 29.589 orang dan guru 579 orang menjadi 157 buah gedung SD dan 190 buah gedung SDN dengan murid 33.209 orang

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, No.reg 2793.

<sup>30</sup> *Ibid.*, No.req 3236.



dan guru 600 orang pada tahun ajaran 1965/1966. Karena begitu pesatnya perkembangan pendidikan di tahun 1964-1966 kendala utama dalam bidang ini adalah kurangnya tenaga pengajar dan alat-alat peraga untuk menunjang pendidikan di daerah Soppeng dengan murid sebanyak 33.209 orang itu diperlukan tenaga pengajar atau guru sebanyak 1.185 orang sedangkan yang ada pada saat itu sebanyak 600 orang jadi masih dibutuhkan sebanyak 585 orang.<sup>31</sup>

Seperti yang telah diulas sebelumnya bahwa ada bencana alam seperti kebakaran yang terjadi sebanyak 4 kali yang menimbulkan kerugian, seperti yang telah terjadi di WelongE Kecamatan Marioriawa yang mendapatkan bantuan berupa beras, pakaian dan atap rumah yang ditaksir kerugian pada bencana alam ini sebesar Rp. 250.000.000,-. Kemudian kebakaran yang terjadi di Desa Jolle Kecamatan Lalabata pada tanggal 5 Desember 1965 yang kerugiannya ditaksir sebesar Rp. 13.000.000,-.<sup>32</sup>

Di bidang politik pun kerjasama serata gotong-royong tetap diperlihatkan baik menyeluruh antara pemerintah/panca tunggal dengan seluruh lapisan masyarakat terutama setelah terjadinya G.30 S terutama Gerakan Pemuda benar-benar memberikan kerjasama dan toleransi yang baik sehingga suasana di daerah ini tetap tenang. Perwira militer sangat memprioritaskan stabilitas keamanan politik. Keamanan politik merupakan suatu hasrat dan yang sangat diperlukan. Institusi-

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, No.reg 2793.

<sup>32</sup> *Ibid.*, No.reg 2793.

institusi yang mendorong maraknya kekacauan sangat dicela. Mereka yang dengan sengaja memicu huru-hara dianggap sebagai orang-orang yang berbahaya. Perwira militer sangat sensitif terhadap kemungkinan huru-hara sehingga situasi tanpa perbedaan pendapat dan persaingan politik pun dianggap sebagai ancaman dan tidak diinginkan. Meletakkan nilai tinggi pada keamanan dalam konteks politik yang pecah belah dan berbahaya merupakan satu masalah, tetapi ia merupakan satu perkara lain kalau perhatian yang berlebihan diberikan dalam konteks politik yang hanya mengandung sedikit perbedaan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Eric A. Nordlinger, *Militer Dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan*, (Jakarta:Rineka Cipta. 1990), hlm. 78.